



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2005 TENTANG  
BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan koordinasi berbagai sektor terkait dalam upaya penanganan bencana di Indonesia, dipandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2005 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana diubah sebagai berikut :

**“Pasal 4 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**“Pasal 4**

Susunan keanggotaan BAKORNAS PB terdiri dari :

- a. Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia
- b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- c. Wakil Ketua : Menteri Dalam Negeri
- d. Anggota :
  1. Menteri Keuangan;
  2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  3. Menteri Perhubungan;
  4. Menteri Pekerjaan Umum;
  5. Menteri Kesehatan;
  6. Menteri Sosial;
  7. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  8. Menteri Pertahanan;
  9. Menteri Kehutanan;
  10. Menteri Pertanian;
  11. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  12. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
  13. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  15. Ketua Palang Merah Indonesia.
- e. Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian BAKORNAS PB.”

**Pasal II ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**Pasal II**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Januari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands